

## Abstrak

UMKM merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak negara. Sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar, pelaku UMKM mendapat keistimewaan dari pemerintah, mereka secara khusus dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Per 01 Juli 2018, penghitungan pajak penghasilan pelaku UMKM mengalami perubahan dari sebelumnya 1% dari omset bruto menjadi 0,5% melalui PP No. 23 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman pelaku UMKM akan penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap minat pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha mereka. Melalui peraturan ini penghitungan pajak penghasilan pelaku UMKM mengalami perubahan dari sebelumnya 1% dari omset bruto menjadi 0,5% melalui PP No. 23 tahun 2018. Dengan menggunakan teori ekspektansi sebagai teori acuan dan metode penelitian kualitatif maka dilakukan wawancara kepada 3 informan. Dari wawancara tersebut diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Peraturan ini membantu mencapai keinginan pelaku UMKM untuk meningkatkan dan memperbesar usaha mereka, pelaku UMKM kurang memahami peraturan baru disebabkan kurangnya sosialisasi, PP No. 23 tahun 2018 dianggap sebagai umpan pemerintah bagi sektor UMKM agar tidak beralih ke sistem penjualan online, pelaku UMKM menyarankan sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah agar sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat, dan sanksi yang harus dipertegas agar penunggak pajak penghasilan UMKM mendapat efek jera.

**Kata kunci:** *PP No. 23 tahun 2018, teori ekspektansi, sistem online, sinkronisasi peraturan*

### ***Abstract***

*UMKM is considered as one of primary contributors to state revenue. Due to its largest tax contributor, UMKM, the Small-Medium Enterprises (SMES), is authorised by government perceiving distinctive final income tax. Since July 1<sup>st</sup> 2018, its income tax changed from 1% of gross turnover to 0.5% owing to a regulation PP No. 23 of 2018. Therefore, this study aimed to investigate the impact of PP No. 23 of 2018 application on the SMEs' desires to expand their business. Through this regulation, the calculation of income tax for SMEs has been converted 1% of gross turnover to 0.5%. This study applied qualitative research with an expectancy theory. In this study, the interviews were conducted to three informants. As the results, this study indicated that the government regulation assisted improving the desires of SMES to escalate their businesses. Then, the SMES generally did not understand the new regulations due to lack of socialization about PP No. 23 of 2018. Moreover, the regulation was identified as an encouragement so that SMEs would not divert into online sales system. Thus, the respondents running SMEs suggested the government to synchronize both central and regional regulations so that SMEs sectors could be increased rapidly. For those who avoided tax needed to be sanctioned for an impact on deterrence.*

**Keywords:** *PP No. 23 of 2018, expectancy theory, online systems, regulation synchronization*